

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi yang dimana demokrasi berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata *democratia* artinya kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari dua kata yaitu *demos* artinya rakyat dan *kratos* artinya kekuasaan. Demokrasi merupakan bentuk pemeritahan yang dimana setiap warga negara nya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh warga negara untuk mencapai cita-cita bersama untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Negara demokratis adalah negara yang mempunyai keunggulan tersendiri, karena pada saat pengambilan keputusan mengacu pada aspirasi masyarakat. Pada negara demokrasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting salah satu peranan masyarakat yang sangat penting pada negara demokrasi yaitu partisipasi masyarakat dalam politik. Tolok ukur keberhasilan demokrasi yaitu apabila masyarakat aktif berpartisipasi pada penyelenggara pemilu. Demokrasi memperbolehkan warga negara berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Membahas mengenai demokrasi tidak bisa terlepas dari politik, karena untuk mewujudkan negara yang demokratis politik sangat diperlukan. Salah satu bentuk melaksanakan negara yang demokrasi dengan pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu merupakan

salah satu sarana demokrasi yang sudah digunakan dibanyak negara termasuk Indonesia yang memiliki masyarakat yang heterogen.

Pemilihan umum sudah diakui secara inklusif merupakan suatu wadah untuk membentuk demokrasi perwakilan dan melaksanakan pemerintahan periodik. Menurut teori demokratis minimalis Schumpetrian (dalam daud.M liando 2016) pemilihan umum adalah suatu wadah yang mewadahi kontestasi antara pelaku politik untuk mendapatkan kekuasaan. Demokrasi menetapkan bahwa pemilu adalah kesempatan untuk para partai oposisi dan rakyat untuk melaksanakan proses *check and balances* kepada partai yang sedang berkuasa. Masyarakat sebagai warga negara ikut aktif berpartisipasi dalam menentukan tujuan dan tokoh kepemimpinan negara melalui mekanisme politik yang dilakukan melalui pesta demokrasi Indonesia dan tanpa adanya keterlibatan masyarakat pada kegiatan pemilu dalam dikatakan bahwa pemilu itu tidak bermakna. Powell (dalam Widianingsih, 2017) pemilu adalah bukan satu-satunya alat demokrasi. Pemilu harus juga didukung oleh alat lainnya dan untuk menumbuhkan komunikasi dan kerjasama. Tetapi pemilu adalah tetap saja alat demokrasi yang utama. Pemilu menyatakan sistem yang menuntut pembuat undang-undang untuk memperhatikan masukan dari rakyat.

Pelaksanaan pemilihan umum adalah salah satu wadah demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan sudah dilaksanakan sebanyak 13 kali sejak awal kemerdekaan sampai pemilihan umum 2019. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 telah melahirkan dilakukannya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan secara langsung. Menurut

peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2005 (dalam Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2005) mengenai pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah ditujukan untuk memilih kepala daerah ditingkat provinsi, kabupaten/kota. Pemilihan umum kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam Undang-Undang dasar tahun 1945 pasal 18 ayat 4 (dalam Savitri, 2020) gubernur, bupati, dan walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis dilaksanakan melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat. Pemilihan umum kepala daerah di Indonesia adalah titipan dari aksi reformasi 1998. Melihat pentingnya partisipasi dari masyarakat yang berperan aktif dalam pemilihan umum kepala daerah, oleh karena itu pemilihan kepala daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan diadakannya pemilihan umum kepala daerah yaitu untuk memajukan demokrasi wilayah setempat, pemerataan daerah, keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan juga untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Selain itu pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana untuk memeriksa pelaksanaan otonomi daerah yang ditujukan kepada para pejabat di daerah setempat.

Pada era otonomi daerah peran masyarakat sangat penting untuk dalam menentukan pembangunan daerah. Salah satu peran masyarakat yaitu partisipasi

politik. Partisipasi politik adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik adalah salah satu indikator yang sangat penting. Semakin tinggi angka partisipasi masyarakat menandakan bahwa masyarakat mengamati dan ikut serta dalam kegiatan politik. *Huntington dan Nelson* (dalam Tajudin, 2016) partisipasi politik adalah aktifitas warga negara yang memiliki tujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. *Milbrath dan Goel* (dalam Tajudin, 2016) mengategorikan partisipasi politik ke dalam beberapa jenis. Tipe masa bodoh, yaitu orang yang tidak mau terlibat dalam kegiatan politik. Tipe spectator, yaitu orang yang setidaknya pernah ikut dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum. Tipe Gladiator, yaitu orang yang aktif dalam kegiatan politik, yaitu sebagai penyambung dengan tugas yang tidak biasa mengadakan perkumpulan, anggota partai dan relawan kampanye serta aktivis masyarakat. Tipe kritis, yaitu orang yang aktif dalam kegiatan politik melalui cara yang berlawanan.

Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yaitu dengan memberikan hak suaranya pada setiap pelaksanaan pemilu. Menurut Adnan (dalam Karsyah, Asrinaldi, & Zetra, 2019) partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah adalah perubahan politik yang utama dalam upaya perluasan penerapan demokrasi di Indonesia di injak-injak sejak tahun 2005. Ada suatu hal yang menarik dalam setiap pelaksanaan pemilu, dan hal itu sudah menjadi fenomena politik. Fenomena itu adalah semakin tingginya sikap apatis masyarakat yang tidak peduli dengan tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah atau disebut golongan putih (golput). Awal mula istilah golput pertama kali ada pada tahun 1971 pada masa orde baru. Sikap golput pertama kali dicetuskan oleh Arief

Budiman, Julius usman, dan Imam Malujo Sumali. Mereka mencetuskan golput ini didasari oleh pada pemikiran bahwa pada sistem demokrasi ada peraturan yang tidak dijalankan dengan benar dan mengarah. Golput pada masa orde baru diartikan sebagai gerakan moral sebagai tindakan protes kepada peraturan yang ada pada masa itu. Di indonesia golput dimaknai dengan kebebasan kritik kepada pemerintah dan menurunkan pemerintah dengan cara reguler dan belum menyentuh pokok pembangunan demokrasi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Pada tahapan demokrasi elektoral dan prosedural golput merupakan pelaksanaan politik, dimana masyarakat tidak ikut aktif dalam partisipasi politik. Secara langsung fenomena golput bukan hanya terjadi di negara demokrasi yang sedang berkembang tetapi terjadi juga pada negara maju yang menganut sistem demokrasi. Contohnya di negara Amerika yang angka partisipasi pemilihnya hanya 50% sampai dengan 60%.

Golongan putih yang terjadi di Indonesia didasari oleh alasan-alasan yang memang fakta dilapangan contohnya seperti : Pemilihan umum atau pemilihan kepala umum daerah belum bisa mewujudkan perubahan yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menurunnya kinerja partai politik yang hanya mementingkan kesejahteraan golongan bukan lagi berpihak pada rakyat, menurunnya sikap moral para elit politik, semakin maraknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para elit politik dan hanya mementingkan jabatan atau kedudukan dibandingkan dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tindakan golput yang dilakukan oleh masyarakat juga karena adanya kejenuhan terhadap pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah yang dianggap hanya kegiatan yang hanya sebatas hanya seremonial dalam demokrasi yang hanya menguntungkan elit politik dan beberapa golongan saja .Menurut andrinof (dalam

Toda, 2015) mengategorikan golongan putih menjadi dua jenis yaitu golongan putih berdasarkan *ideology* dan golongan putih berdasarkan administratif. Golput berdasarkan ideologi didasarkan oleh suatu keyakinan yang berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan sadar dan kemudian memilih untuk tidak berpartisipasi karena tidak ada pilihan yang tepat atau tidak layak untuk dipilih. Golput berdasarkan administratif didasarkan oleh sistem penyelenggaraan yang kurang tepat dan mengecewakan pemilih. Pemilih memutuskan tidak memilih dikarenakan adanya kekurangan dari sistem yang ada dan fasilitas yang diberikan oleh bagian yang mengatasi masalah administratif.

Pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah kota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 KPU Kota Tangerang Selatan menargetkan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 dengan angka 57,99% atau sama dengan tingkat partisipasi pemilihan umum kepala daerah kota Tangerang Selatan tahun 2015. Angka ini ditargetkan karena melihat kondisi yang saat ini dengan adanya Pandemi *Covid-19* dimana masyarakat memiliki banyak pertimbangan untuk datang ke tempat pemungutan suara memberikan hak suaranya. Setelah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2020, tingkat partisipasi masyarakat kota Tangerang Selatan tercatat 594.771 atau 60,30% dari jumlah daftar pemilih tetap sejumlah 986.382 dengan angka golongan putih (golput) sebesar 391.611 atau 39,7%. Sedangkan, pada tahun 2015 angka partisipasi masyarakat tercatat sejumlah 533.807 atau 57,99% dari jumlah pemilih tetap sejumlah 920.582 dengan angka golongan putih (golput) sebesar 86.775 atau 42,01%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah Kota

Tangerang selatan mengalami peningkatan sebesar 2,31% dari pemilihan umum kepala daerah sebelumnya. Walaupun angka partisipasi masyarakat melebihi target yang diharapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan, faktor golput tetap menarik untuk dikaji lebih dalam karena selalu berbeda di setiap waktu dan setiap daerah. Sikap golput bisa datang dari berbagai lapisan masyarakat seperti buruh, petani, pedagang, aparatur pemerintah dan juga kalangan anak muda.

B. Masalah Penelitian

Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab golongan putih yang terjadi pada masyarakat Lesbelles Maisons kelurahan Pondok Jagung yang notabane masyarakat kalangan menengah ke atas. Menurut (Maliki, 2010) kelas menengah atas yaitu kalangan yang memiliki kekayaan yang banyak, berpengaruh pada sektor-sektor masyarakat personal maupun umum, memiliki penghasilan yang tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, dan memiliki kestabilan kehidupan di keluarganya. Dikalangan menengah atas faktor penyebab golput banyak terjadi karena alasan administratif dan teknis . Kalangan menengah atas banyak melihat pada perilaku yang kurang baik para elit politik yang melakukan korupsi yang menyebabkan kalangan menengah atas melakukan golput karena tidak percaya lagi kepada para elit politik yang berkuasa. Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota Tangerang Selatan tahun 2020 masyarakat Lesbelles maisons yang mempunyai daftar pemilih tetap laki-laki 146 orang perempuan 146 orang jumlah 292, tetapi pada setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota Tangerang Selatan 2020 yang memberikan hak suaranya hanya 60 orang laki-laki dan 54 orang perempuan berjumlah 114 orang. Dengan hasil itu dapat dilihat bahwa orang yang melakukan golput di perumahan sebanyak 178 orang atau sebesar 60,9%, angka ini lebih besar dari orang yang memberikan hak

suara nya, Sedangkan pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 angka golput pada masyarakat Lesbelles Maisons sebanyak 136 orang dari 325 jumlah daftar pemilih tetap. Hal ini menjadi permasalahan pada kehidupan demokrasi dimana partisipasi masyarakat hal yang penting dalam berdemokrasi terlebih notabane masyarakat perumahan Lesbelles Maisons kelas menengah atas yang paham politik dan memiliki pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti faktor penyebab golongan putih di perumahan Lesbelles Maisons kelurahan Pondok Jagung.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mutiara Nuary Anhas (2017) yang berjudul *Faktor- Faktor penyebab Golput Pada Pilkada Kota Pariaman 2013*. Faktor penyebab golput pada pilkada Kota Pariaman yaitu aktor sosial-ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan dan pengaruh keluarga sangat memberikan pengaruh kepada masyarakat di Kota Pariaman dalam hal tidak ikut serta memilih (golput) pada saat pemilihan umum kepala daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lindo Karsyah, Asrinaldi dan Aidinil Zetra pada tahun (2019) yang berjudul "*Golput Terdidik Pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Si Junjung*" menjelaskan bahwa masyarakat si Junjung melakukan golput karena pertimbangan yang matang. Mereka melihat visi misi pasangan calon, melihat rekam jejak pasangan calon, setelah itu mereka memutuskan melakukan gerakan golput.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab golongan putih dalam pemilihan umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 pada masyarakat Lesbelles Maisons Kelurahan Pondok Jagung.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian ini adalah masyarakat Lesbelles Maisons Kelurahan Pondok Jagung.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Lesbelles Maisons Kelurahan Pondok Jagung tentang Pemilukada ?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Lesbelles Maisons Kelurahan Pondok Jagung tentang golongan putih dalam Pemilukada ?
3. Mengapa masyarakat Lesbelles Maisons kelurahan Pondok Jagung memilih untuk golongan putih pada Pemilukada Tangerang Selatan 2020 ?

E. Kerangka Konseptual

